



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 124.5 TAHUN 2016

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Kota Tidore Kepulauan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan yang berisi Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Indikator Kinerja Utama Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kota Tidore Kepulauan yang diatur dalam Keputusan Walikota ini.

Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja serta stakeholder mengetahuinya dengan memerintahkan penetapan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 18 November 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 124.5 Tahun 2016

TANGGAL : 18 November 2016

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN HASIL REVIU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN HASIL REVIU**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
Misi 1 : Memperkuat dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup							
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatkan infrastruktur darat dan laut yang mendukung perekonomian daerah	1.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Jumlah Panjang Jalan di Kota Tidore Kepulauan x 100% Tipe penghitungan: Kumulatif	Laporan Pelaksanaan Tugas	Dinas PU & Penataan Ruang
			2.	Presentase Pasar yang dibangun dan tingkatkan sarana dan prasarannya	Jumlah Pasar yg dibangun/Jumlah seluruh pasar di Kota Tidore Kepulauan x 100% Tipe penghitungan: Kumulatif	Laporan Pelaksanaan Tugas	Dinas Perindagkop & UKM
			3.	Presentase Pelabuhan Laut dalam Kondisi Baik	Jumlah Pelabuhan laut dalam kondisi Rusak / Jumlah Pelabuhan Laut Yang Ada di Kota Tidore Kepulauan x 100% Tipe penghitungan: Kumulatif	Laporan Pelaksanaan Tugas	Dinas Perhubungan
		2. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4.	Rasio Kawasan Kumuh	Hasil deliansi yang dilaksanakan setiap tahun	Laporan hasil deliansi	Dinas Perkimthan
		5.	Presentase Penanganan Sampah	Volume Sampah Yang Ditangani (m3) / Volume Produksi Sampah (m3) x 100%) Tipe penghitungan: Kumulatif	Laporan Pelaksanaan Tugas	Dinas Lingkungan Hidup	
Misi 2 : Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta pertanian berbasis potensi unggulan wilayah							
2.	Produktivitas wilayah dan akses pemasaran produk kelautan/perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah yang semakin berkembang	3. Meningkatkan hasil produksi perikanan berbasis unggulan wilayah	6.	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Perikanan Tangkap / Hasil Produksi x 100 % Tipe penghitungan: Kumulatif	Laporan Pelaksanaan Tugas	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4. Meningkatkan hasil produksi pertanian yang berbasis unggulan wilayah	7.	Produksi pertanian dan perkebunan	Jumlah produksi pertanian dan perkebunan setiap tahun	Laporan Pelaksanaan Tugas	Dinas Pertanian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab							
1	2	3	4	5	6	7							
Misi 3 : Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan geostrategi, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah													
3.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang seiring dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi berbasis pada potensi local	8.	BUMD/BUMDes yang Terbentuk	Pembentukan BUMD/BUMDes pada tahun bersangkutan	Laporan pelaksanaan tugas	Dinas Pemberdayaan Masy & Desa						
			9.	Nilai Investasi Penanaman Modal	Nilai Investasi penanaman modal dalam satu tahun	Laporan investasi daerah	Dinas PM & PTSP						
		6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan lapangan usaha	10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Partisipasi angkatan kerja tahun bersangkutan	Buku ketenaga kerjaan	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi						
			11.	Pertumbuhan wirausaha IKM baru	IKM baru di tahun bersangkutan	Laporan pertumbuhan IKM	Dinas Perindagkop dan UKM						
		7. Meningkatnya pariwisata daerah	12.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kunjungan Wisatawan terdiri dari Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara setiap tahun	Laporan kunjungan wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
Misi 4 : Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan daerah													
4.	Sumber daya manusia yang semakin handal dan dapat bersaing baik secara lokal, nasional maupun internasional.	8. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek pembangunan yang berbasis IPTEK	13.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Perhitungan berdasarkan komponen IPM metode baru, yakni : Angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun	Buku Laporan Indeks Pembangunan Manusia	Bapelitbang						
								9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata dengan mempertimbangkan potensi keunggulan local	14.	Persentase akreditasi minimal B untuk SD/MI	Jumlah SD/MI yang berakreditasi B dibagi jumlah seluruh SD/MI dikali 100%	Laporan akreditasi sekolah	Dinas Pendidikan
									15.	Persentase akreditasi minimal B untuk SMP/MTs	Jumlah SMP/MTs yang berakreditasi B dibagi jumlah seluruh SMP/MTs dikali 100%	Laporan akreditasi sekolah	Dinas Pendidikan
								10. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata	16.	Presentase Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	Laporan akreditasi puskesmas	Dinas Kesehatan
		17.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah Kunjungan Pasien Miskin Di Sarana Kesehatan Strata 1/ Jumlah Seluruh Maskin di Kota Tidore Kepulauan x 100 %	Laporan pelaksanaan Tugas	Dinas Kesehatan							
			18.	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	Jumlah Angka Kematian Ibu dan Bayi Tahun berkenan/ Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di tahun sebelumnya x 100 %	Laporan pelaksanaan Tugas	Dinas Kesehatan						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
Misi 5 : Penguatan pembangunan sosial dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan						
5.	Masyarakat yang semakin sejahtera dengan tetap mempertahankan nilai-nilai social, budaya dan kearifan lokal daerah yang menjadi modal sosial dalam percepatan pembangunan	11. Terpeliharanya wujud kebudayaan (<i>art</i> , artefak dan <i>idea</i>)	19. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Formulasi perhitungan: (Jumlah tempat situs sejarah dan cagar yang dirawat / jumlah situs sejarah di Kota Tidore Kepulauan X 100%). Tipe penghitungan: Non Kumulatif	Laporan Pelaksanaan Tugas	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		12. Terpeliharanya semangat gotog royong (<i>mayae</i> , bari) dalam kehidupan sosial masyarakat	20. Indeks partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi masyarakat pada musrembang, dengan menggunakan empat variabel yakni, variabel pemahaman dan keaktifan, komunikasi dan demokrasi, peranan dan komitmen, serta kontrol masyarakat	Laporan survei indeks pasrtisipasi masyarakat	Bapelitbang
Misi 6 : Reformasi Birokrasi						
6.	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	13. Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat	21. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah OPD dengan IKM 75 atau lebih dibandingkan dengan seluruh OPD	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	OPD Pelayanan Publik
			22. Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pelayanan publik	Hasil Evaluasi OMBUDSMAN RI (cukup jelas)	Laporan Hasil Evaluasi	OPD Pelayanan Publik
		14. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	23. Opini BPK terhadap LKPD	HasilEvaluasi / Opini BPK RI (cukup jelas)	Hasil Evaluasi LKPD	BPKAD
			24. Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian PMPRB (cukup jelas)	Laporan Hasil Penilaian PMPRB	Sekretariat Daerah
		15. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah	25. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat (D-C-CC-B-BB-A-AA)	Hasil Evaluasi LKIP Kemenpan & RB	Sekretariat Daerah
			26. Nilai LPPD	Nilai/ Predikat (cukup jelas)	Hasil Evaluasi LPPD Kemendagri	Sekretariat Daerah

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 18 November 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttt

ALI IBRAHIM